PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI SARANA LITERASI POLITIK DALAM MENGHADAPI DISINFORMASI DI MEDIA SOSIAL

Ayu Sartini[1*], Dewa Bagus Sanjaya[2], I Nengah Suastika[3]
[1,2,3]Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan Dasar, Singaraja

Email: ayu.sartini@student.undiksha.ac.id[1]*, bagus.sanjaya@undiksha.ac.id[2], nengah.suastika@undiksha.ac.id[3]

Abstract

The development of information and communication technologies has positioned social media as a primary medium for obtaining and disseminating political information. However, this convenience has also facilitated the spread of disinformation, hoaxes, propaganda, hate speech, and the manipulation of public opinion, all of which may undermine the quality of democracy. This study aims to examine the role of Civic Education (PKn) as an instrument of political literacy in addressing disinformation circulating on social media platforms. The research was conducted using a literature review method with a descriptive qualitative approach, based on the analysis of relevant scholarly journals, books, and prior studies. The findings indicate that PKn contributes to strengthening students' critical thinking skills, digital literacy, understanding of political concepts and processes, as well as the internalization of the values of Pancasila. Furthermore, PKn encourages learners to verify information, identify various forms of disinformation, and engage with social media in an analytical, critical, and responsible manner. Therefore, strengthening PKn with an emphasis on political and digital literacy is considered an essential strategy for cultivating students who are critical, democratic, and capable of responding effectively to political disinformation in the digital era.

Keywords: Civic Education, Political Literacy, Disinformation, Social Media, Digital *Literacy*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan media sosial sebagai sarana utama dalam memperoleh dan menyebarluaskan informasi politik. Namun, kemudahan tersebut juga meningkatkan penyebaran disinformasi, hoaks, propaganda, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai instrumen literasi politik dalam menangani disinformasi yang beredar di media sosial. Penelitian dilaksanakan dengan metode studi pustaka melalui pendekatan kualitatif deskriptif, yakni dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PKn berkontribusi dalam penguatan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, pemahaman tentang konsep dan proses politik, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, PKn mendorong peserta didik untuk melakukan verifikasi informasi, mengidentifikasi bentuk-bentuk disinformasi, serta menggunakan media sosial secara analitis, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan PKn yang berorientasi pada literasi politik dan literasi digital dipandang sebagai strategi esensial dalam membentuk peserta didik yang kritis, demokratis, dan adaptif terhadap disinformasi politik pada era digital.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Literasi Politik, Disinformasi, Media Sosial, Literasi Digital

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik (Apdillah et al., 2022). Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah bergesernya pola penyebaran informasi politik yang kini terutama berlangsung melalui media sosial. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, X, dan YouTube telah menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk mengakses informasi politik secara cepat, praktis, dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Informasi mengenai kebijakan pemerintah, pemilu, isu nasional, dan opini publik dapat tersebar dalam hitungan detik tanpa adanya batas ruang dan waktu (Rahim et al., 2024).

Kehadiran media sosial pada dasarnya memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Masyarakat tidak lagi terbatas pada peran sebagai penerima informasi, melainkan juga memiliki kapasitas untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam diskusi publik, serta melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kondisi ini berpotensi mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih aktif dalam praktik kehidupan demokratis. (Arpandi, 2023; Muhammad et al., 2023). Namun, keterbukaan dan kemudahan dalam memperoleh informasi juga menghadirkan tantangan baru. Informasi politik yang beredar di media sosial tidak seluruhnya memiliki tingkat kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Disinformasi, hoaks, propaganda, ujaran kebencian, dan manipulasi opini menjadi persoalan yang dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu isu politik (Agma, 2025).

Disinformasi politik menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian karena informasi yang keliru atau sengaja dimanipulasi dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap tokoh, kebijakan, maupun proses politik. Penyebaran informasi semacam ini semakin mudah terjadi ketika suatu konten dikemas dengan bahasa yang emosional, provokatif, dan menarik perhatian pengguna media sosial. Dalam kondisi tersebut, kemampuan individu untuk memeriksa sumber, membandingkan informasi, serta membedakan fakta dan opini menjadi sangat penting. Rendahnya kemampuan verifikasi informasi dapat menyebabkan masyarakat menerima dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya (Azwar, 2022).

Generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terpapar disinformasi politik karena tingginya intensitas penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari (Somadi & Amelia, 2025). Sebagai pengguna aktif ruang digital, mereka sering menerima berbagai informasi politik tanpa proses penyaringan yang memadai. Akibatnya, banyak generasi muda membentuk pandangan politik berdasarkan opini yang tidak valid, propaganda kelompok tertentu, atau bahkan ikut menyebarkan berita palsu secara tidak sadar (Susilawati & Kurnia, 2024).

Dalam konteks pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi kondisi tersebut. Pembelajaran PKn tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai norma, hukum, konstitusi, dan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan karakter warga negara yang kritis, demokratis, dan bertanggung jawab. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting di era digital karena peserta didik perlu memiliki kecakapan dalam memahami berbagai persoalan politik sekaligus menilai informasi yang diterimanya secara rasional (Matnuh et al., 2024).

Landasan teoritis penelitian ini berfokus pada konsep literasi politik dan literasi digital sebagai bagian penting dari pendidikan demokrasi. Literasi politik merupakan kemampuan seseorang dalam memahami sistem politik, proses pengambilan keputusan publik, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan bernegara secara bertanggung jawab. Sementara itu, Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab, termasuk kemampuan untuk menilai validitas informasi yang beredar di media sosial. Kedua konsep tersebut saling berhubungan dan menjadi landasan penting dalam pembelajaran PKn pada era digital.

Permasalahan yang muncul saat ini adalah masih rendahnya tingkat literasi politik siswa dalam menghadapi disinformasi di media sosial. Banyak siswa belum mampu membedakan antara fakta dan opini, belum memiliki kebiasaan memverifikasi informasi, serta masih mudah terpengaruh oleh narasi politik yang

provokatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan politik di sekolah perlu diperkuat agar siswa tidak menjadi korban manipulasi informasi digital.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah melalui penguatan peran PKn sebagai sarana literasi politik berbasis literasi digital. Pembelajaran PKn perlu dikembangkan melalui strategi yang lebih kontekstual, seperti diskusi isu politik terkini, analisis berita politik dari media sosial, debat ilmiah berbasis fakta, simulasi demokrasi di sekolah, dan proyek verifikasi berita hoaks. Melalui pendekatan tersebut, siswa diharapkan mampu mengembangkan sikap kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam menyikapi informasi politik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana literasi politik dalam menghadapi disinformasi di media sosial serta menjelaskan strategi implementasi PKn dalam membentuk warga negara yang cerdas dan demokratis di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pembelajaran PKn sebagai instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode studi pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sarana literasi politik dalam menghadapi disinformasi di media sosial berdasarkan berbagai sumber teori, hasil penelitian terdahulu, dan literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, prosiding, peraturan perundang-undangan, serta dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, sumber data utama berasal dari literatur yang membahas Pendidikan Kewarganegaraan, literasi politik, literasi digital, demokrasi, disinformasi politik, serta pengaruh media sosial terhadap perilaku politik masyarakat.

Sumber data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional yang secara langsung membahas peran PKn dalam membangun literasi politik dan menghadapi hoaks politik di media sosial. Data sekunder meliputi buku Pendidikan Kewarganegaraan, teori demokrasi, teori literasi digital, artikel ilmiah pendukung, serta dokumen resmi yang relevan dengan kajian penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelaahan literatur secara sistematis. Peneliti menelusuri berbagai sumber yang relevan melalui perpustakaan digital, jurnal elektronik, buku referensi, serta basis data akademik, seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal yang disediakan oleh universitas. Literatur yang digunakan diseleksi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu keterkaitan antara Pendidikan Kewarganegaraan, literasi politik, dan disinformasi politik pada era media sosial. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis isi dilakukan dengan menelaah secara kritis isi literatur, mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama, kemudian menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Tema utama yang dianalisis meliputi konsep literasi politik, bentuk-bentuk disinformasi politik di media sosial, dampak disinformasi terhadap demokrasi, serta strategi penguatan PKn dalam menghadapi tantangan tersebut.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan interpretasi dari berbagai sumber yang telah dianalisis.

Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai pendapat dari referensi yang berbeda guna memperoleh

informasi yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang memiliki tingkat akurasi tinggi serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran penting Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sarana literasi politik dalam menghadapi dan menangkal disinformasi yang berkembang melalui media sosial.

Melalui penerapan metode penelitian tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran politik, kemampuan berpikir kritis, serta ketahanan dalam menghadapi berbagai bentuk disinformasi politik di era digital.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan metode studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber referensi berupa jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), literasi politik, disinformasi politik, dan media sosial. Kajian literatur ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang kuat serta menelaah perkembangan penelitian sebelumnya terkait peran PKn sebagai sarana literasi politik dalam menghadapi disinformasi di media sosial. Melalui kajian literatur, ditemukan bahwa sebagian besar penelitian menekankan pentingnya literasi digital, pendidikan demokrasi, dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi penyebaran hoaks politik di era digital. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk warga negara yang demokratis, kritis, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memperjelas hasil kajian literatur tersebut, disajikan Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu yang memuat beberapa temuan penelitian relevan sebagai dasar dan pendukung penelitian ini.

1. (Herianto dkk., 2022) — Digital Civic Education

Buku ini menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan digital berperan penting dalam membentuk warga negara yang mampu menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga pada keterampilan kewarganegaraan dan karakter kewarganegaraan di ruang digital. Literasi digital, etika bermedia sosial, partisipasi politik digital, dan tanggung jawab dalam menyaring informasi merupakan bagian penting dalam pembentukan kewarganegaraan digital. Penelitian ini sangat relevan karena mendukung kajian tentang PKn sebagai sarana literasi politik dalam menghadapi disinformasi di media sosial melalui penguatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta pembentukan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab di era digital.

2. (Anggraeni dkk., 2024) — Pancasila and Civic Education (2024)

Buku ini menjelaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran mengenai hak dan kewajibannya sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan tidak semata-mata menekankan pada penguasaan pengetahuan teoritis mengenai Pancasila, demokrasi, konstitusi, dan hak asasi manusia, tetapi juga diarahkan pada pengembangan karakter, penerapan etika dalam bermedia sosial, serta peningkatan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana utama dalam menumbuhkan literasi politik dan kesadaran demokrasi di era digital. Penelitian ini sangat relevan karena mendukung kajian tentang PKn sebagai sarana literasi politik dalam menghadapi disinformasi di media sosial melalui penguatan karakter demokratis, kesadaran politik, dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyaring informasi digital.

3. (Hanif & Salsabillah, 2024) — Civic Education in the Digital Era (Political Socialization Theory Perspective)

Pendidikan Kewarganegaraan pada era digital memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran politik generasi muda

melalui pengintegrasian literasi digital, kemampuan berpikir kritis, etika dalam penggunaan teknologi digital, serta partisipasi politik yang aktif dan bertanggung jawab. Perkembangan media digital telah menjadikannya sebagai salah satu agen sosialisasi politik baru yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap dan pemahaman politik peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung kajian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen literasi politik dalam menghadapi disinformasi di media sosial, terutama melalui penguatan literasi digital dan pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik.

4. (Lestari dkk., 2025) — Digital Literacy and Political Disinformation: A Critical Study of IKIP PGRI Bojonegoro Students on TikTok

Literasi digital memiliki empat peran utama dalam menghadapi disinformasi politik, yaitu mengubah cara mahasiswa mengakses dan menafsirkan informasi politik, meningkatkan kemampuan memverifikasi sumber dan fakta, memperkuat ketahanan terhadap manipulasi algoritma dan bias emosional, serta mendorong partisipasi kritis dan etis di media sosial. Semakin tinggi kemampuan literasi digital mahasiswa, semakin kuat pula kemampuan mereka mengenali dan menolak disinformasi politik. Penelitian ini sangat relevan karena mendukung kajian tentang PKn sebagai sarana literasi politik dalam menghadapi disinformasi di media sosial, khususnya melalui penguatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan memverifikasi informasi politik pada generasi muda.

5. (Saragih dkk., 2025) — Analysis of the Role of Social Media in Shaping Public Opinion in the 2024–2029 Presidential Election in the PPKn Department, Class of 2023

Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini publik mahasiswa terkait pemilihan presiden tahun 2024. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter berperan sebagai sumber utama informasi politik, khususnya melalui konten debat, diskusi, dan analisis politik. Walaupun opini publik yang berkembang di media sosial berkontribusi secara signifikan terhadap pertimbangan dan keputusan politik mahasiswa, mereka tetap cenderung mencari informasi yang lebih kredibel dari berbagai sumber guna meminimalkan risiko misinformasi dan hoaks politik. Penelitian ini relevan karena memperkuat kajian mengenai pentingnya literasi politik dan keterampilan verifikasi informasi dalam pembelajaran PKn, sehingga peserta didik tidak mudah dipengaruhi oleh disinformasi politik di media sosial.

6. (Nasoha dkk., 2025) — Civic Education as a Counter-Disinformation Strategy in the Post-Truth Era

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menghadapi disinformasi dan hoaks melalui penguatan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan pembentukan karakter demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan membantu masyarakat menjadi lebih selektif dalam menerima informasi dan memperkuat nilai moral generasi muda. Penelitian ini sangat relevan karena secara langsung membahas peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai strategi utama dalam menangkal disinformasi politik di media sosial dan memperkuat literasi politik masyarakat.

7. (Az-zahra dkk., 2025) — Digital Citizenship and the Challenges of Social Media Ethics in the Era of Information Disruption

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi digital, terbatasnya kesadaran terhadap hukum, serta melemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya krisis etika dalam ruang digital di Indonesia. Permasalahan tersebut tercermin dalam berbagai bentuk perilaku, seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, pelanggaran terhadap privasi, dan perundungan siber. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif melalui penguatan pendidikan etika digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, penyempurnaan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penelitian ini sangat relevan karena mendukung kajian tentang PKn sebagai sarana literasi politik dalam menghadapi disinformasi di media sosial melalui penguatan literasi digital, etika bermedia sosial, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila pada siswa.

Berdasarkan hasil kajian literatur melalui metode studi pustaka, ditemukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana literasi politik dalam menghadapi disinformasi di media sosial. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan media sosial sebagai ruang utama penyebaran informasi politik secara cepat dan luas. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X menjadi sumber utama masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah, pemilu, isu nasional, dan berbagai opini politik publik. Namun, kemudahan akses informasi juga menimbulkan permasalahan serius berupa maraknya disinformasi politik, hoaks, propaganda digital, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik. Informasi palsu yang tersebar secara masif dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tokoh politik, kebijakan pemerintah, bahkan hasil pemilu. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas demokrasi dan mengancam persatuan sosial apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi politik yang memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi politik menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan siswa mudah terpengaruh oleh informasi politik yang menyesatkan. Banyak siswa belum mampu membedakan antara fakta, opini, propaganda, dan berita palsu. Mereka cenderung menerima dan menyebarkan informasi dengan cepat tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber maupun isi informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis terhadap informasi politik masih tergolong rendah, terutama pada generasi muda yang sangat aktif menggunakan media sosial. Dalam kondisi ini, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen penting dalam membangun kesadaran politik siswa. PKn tidak hanya mengajarkan teori mengenai demokrasi, konstitusi, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Melalui pembelajaran PKn, siswa dibekali kemampuan memahami isu politik secara rasional dan menilai informasi berdasarkan fakta, bukan emosi atau fanatisme kelompok.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dalam pembelajaran PKn merupakan kebutuhan yang sangat penting. Literasi digital membantu siswa mengenali ciri-ciri hoaks, melakukan verifikasi fakta, memahami etika bermedia sosial, serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Semakin tinggi kemampuan literasi digital seseorang, semakin kuat pula kemampuannya menolak disinformasi politik dan menghindari pengaruh manipulasi algoritma media sosial.

PKn juga berperan dalam memperkuat kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran yang mendorong analisis sumber informasi, evaluasi isi berita, dan kemampuan membedakan antara fakta dan opini. Sikap kritis ini sangat penting dalam menghadapi derasnya arus informasi politik di media sosial yang sering kali belum terverifikasi dengan baik. Selain itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi benteng moral dalam menghadapi disinformasi politik. Nilai persatuan, toleransi, keadilan sosial, musyawarah, dan tanggung jawab sosial membantu siswa agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi politik yang memecah belah masyarakat. Pendidikan karakter melalui PKn membantu membangun etika politik yang sehat dan menumbuhkan sikap demokratis dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, PKn memiliki tiga fungsi utama dalam menghadapi disinformasi di media sosial, yaitu sebagai sarana pendidikan politik, penguatan literasi digital, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Ketiga fungsi tersebut berperan dalam membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, demokratis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan demokrasi digital.

Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat strategis sebagai sarana literasi politik dalam menghadapi disinformasi di media sosial. Literasi politik tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai sistem pemerintahan, pemilu, demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga mencakup kemampuan individu dalam memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi politik secara kritis. Pada era digital saat ini, kemampuan tersebut menjadi sangat penting karena masyarakat, khususnya generasi muda, sangat dekat dengan media sosial sebagai sumber utama informasi politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

penguatan literasi politik melalui PKn menjadi penting karena kemampuan memahami persoalan politik dapat menjadi dasar bagi siswa untuk menilai informasi yang diterima, bukan sekadar menerima informasi secara pasif. Hal ini sejalan dengan penelitian Umam (2025) yang menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan digital berperan dalam membentuk kemampuan berpikir kritis dan mendeteksi misinformasi pada generasi Z.

Media sosial telah menjadi ruang baru dalam kehidupan demokrasi modern. Informasi politik dapat tersebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, namun di sisi lain juga membuka peluang luas bagi penyebaran hoaks, propaganda, manipulasi opini, dan ujaran kebencian. Disinformasi politik yang tersebar secara masif dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat, merusak kualitas demokrasi, bahkan memecah persatuan bangsa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap informasi politik tidak selalu diikuti dengan kemampuan untuk menilai kebenaran informasi. Oleh karena itu, pendidikan politik perlu disertai dengan kemampuan literasi digital agar siswa mampu menghadapi karakter informasi di media sosial yang cepat dan beragam. Penelitian Widiatmaka dan Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan literasi digital melalui PKn dapat digunakan untuk meningkatkan *civic literacy* dan membantu peserta didik menghadapi informasi yang berkembang di media sosial.

PKn berfungsi sebagai pendidikan politik yang memberikan pemahaman dasar mengenai demokrasi, konstitusi, sistem pemerintahan, serta partisipasi politik yang sehat. Melalui proses pembelajaran ini, siswa tidak hanya memahami bagaimana negara dijalankan, tetapi juga memahami peran mereka sebagai warga negara dalam menjaga kehidupan demokrasi. Pemahaman ini sangat penting agar siswa tidak mudah terpengaruh oleh informasi politik yang menyesatkan dan mampu mengambil keputusan politik secara rasional. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik dalam PKn memiliki fungsi preventif terhadap disinformasi. Siswa yang memahami konsep demokrasi dan kehidupan politik memiliki dasar pengetahuan untuk mempertanyakan informasi yang tidak sesuai dengan prinsip atau fakta politik yang telah dipelajarinya. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya membentuk pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi siswa dalam menentukan sikap terhadap informasi politik yang diterima di media sosial. Temuan ini sejalan dengan Naibaho et al. (2024) yang menunjukkan bahwa PKn berperan dalam membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital untuk menghadapi disinformasi dan hoaks selama proses politik.

Salah satu bentuk konkret peran PKn adalah memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa perlu dibiasakan untuk tidak menerima informasi secara mentah, melainkan menganalisis sumber informasi, isi berita, serta tujuan di balik penyebaran informasi tersebut. Kemampuan membedakan antara fakta, opini, propaganda, dan berita palsu menjadi bagian penting dalam literasi politik. Dalam konteks ini, guru PKn berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa agar menjadi pembaca informasi yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis menjadi penghubung antara pengetahuan politik dan tindakan siswa dalam menghadapi informasi digital. Siswa tidak hanya mengetahui bahwa hoaks merupakan informasi yang salah, tetapi juga memiliki proses berpikir untuk memeriksa sumber dan membandingkan informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Penelitian terbaru juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual siswa mengenai disinformasi dan keterampilan aktual dalam melakukan verifikasi informasi, sehingga kebiasaan melakukan pengecekan fakta perlu diperkuat dalam pembelajaran PKn.

Selain itu, integrasi literasi digital ke dalam pembelajaran PKn merupakan langkah yang sangat penting. Literasi digital membantu siswa memahami cara memverifikasi berita, mengenali akun palsu, memahami jejak digital, serta menggunakan media sosial secara etis dan bertanggung jawab. Pendidikan literasi digital yang terintegrasi dengan PKn mampu memperkuat ketahanan siswa terhadap manipulasi informasi politik yang sering muncul di ruang digital. Hasil ini diperkuat oleh Utami et al. (2026) yang menunjukkan bahwa literasi digital berperan dalam meningkatkan kemampuan pemilih pemula untuk

memverifikasi informasi dan menghindari penyebaran informasi politik yang belum terverifikasi. Dengan demikian, literasi digital dalam PKn tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan media sosial, tetapi juga kemampuan mengevaluasi informasi dan mempertimbangkan dampaknya sebelum mengambil tindakan.

Nilai-nilai Pancasila juga menjadi landasan utama dalam menghadapi disinformasi politik. Sila Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari politik yang memecah belah masyarakat. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menanamkan sikap menghargai perbedaan pendapat dan menolak ujaran kebencian. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan pentingnya demokrasi yang sehat melalui musyawarah dan dialog. Dengan internalisasi nilai-nilai tersebut, siswa memiliki benteng moral yang kuat dalam menyikapi konflik politik di media sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menghadapi disinformasi tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga berkaitan dengan etika dan karakter kewarganegaraan. Siswa perlu mengetahui cara mengidentifikasi informasi yang salah sekaligus memahami bahwa menyebarkan informasi yang dapat memecah persatuan bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa. Penelitian mengenai kewarganegaraan digital juga menunjukkan bahwa penguatan literasi digital perlu berjalan bersama internalisasi nilai Pancasila untuk menghadapi hoaks, ujaran kebencian, dan berbagai persoalan etika di ruang digital.

PKn juga berperan dalam membentuk etika politik yang sehat. Politik tidak seharusnya dipahami hanya sebagai perebutan kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan bersama dan keadilan sosial. Pendidikan politik melalui PKn membantu siswa memahami bahwa partisipasi politik harus dilakukan secara bertanggung jawab, santun, dan berorientasi pada kepentingan bangsa, bukan sekadar fanatisme kelompok.

Implementasi PKn sebagai sarana literasi politik dapat dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran, seperti diskusi isu politik terkini, analisis berita politik dari media sosial, debat ilmiah berbasis fakta, simulasi pemilu di sekolah, serta proyek pengecekan fakta terhadap berita hoaks. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran PKn lebih kontekstual dan dekat dengan realitas kehidupan siswa sehingga tujuan pembentukan warga negara yang kritis dan demokratis dapat tercapai secara lebih efektif.

Dengan demikian, PKn tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran formal di sekolah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital. Penguatan PKn berbasis literasi politik dan literasi digital menjadi langkah penting dalam membentuk generasi muda yang mampu menghadapi tantangan disinformasi politik, menjaga persatuan bangsa, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi secara sehat dan bertanggung jawab.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana literasi politik dalam menghadapi disinformasi di media sosial. Perkembangan media sosial telah membuat informasi politik semakin mudah diakses oleh masyarakat, khususnya generasi muda, namun juga meningkatkan risiko penyebaran hoaks, propaganda politik, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik yang dapat mengancam kualitas demokrasi dan persatuan sosial. Rendahnya tingkat literasi politik dan literasi digital menjadi salah satu penyebab utama siswa mudah terpengaruh oleh informasi politik yang menyesatkan. Banyak siswa belum mampu membedakan antara fakta, opini, propaganda, dan berita palsu sehingga mereka cenderung menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber maupun isi informasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan politik melalui PKn perlu diperkuat agar siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi digital.

Dalam situasi ini, PKn berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk warga negara yang kritis, demokratis, dan bertanggung jawab. PKn tidak hanya mengajarkan konsep demokrasi, konstitusi, serta hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga memperkuat kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai benteng moral dalam menghadapi disinformasi

politik. Penguatan kemampuan memverifikasi informasi, etika bermedia sosial, serta partisipasi politik yang sehat menjadi bagian penting dalam pembelajaran PKn di era digital. Dengan demikian, penguatan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis literasi politik dan literasi digital menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas demokrasi, memperkuat persatuan bangsa, serta menciptakan generasi muda yang mampu menghadapi tantangan informasi politik secara bijak dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah lebih menekankan penguatan literasi politik dan literasi digital secara kontekstual sesuai perkembangan zaman. Guru PKn perlu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti analisis berita politik, diskusi isu terkini, debat ilmiah, simulasi demokrasi, serta kegiatan verifikasi informasi agar siswa terbiasa berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima dari media sosial. Sekolah juga perlu mendukung budaya literasi digital yang sehat melalui penanaman etika bermedia sosial dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan agar generasi muda mampu menggunakan media sosial secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi politik.

Daftar Pustaka

Agma, A. R. (2025). Hoaks Dan Disinformasi Di Media Sosial: Strategi Literasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Publik. *Jurnal Komunikasi Dan Media*, *1*(1), 30–36.

Ahmad, T., Alvi, A., & Ittefaq, M. (2019). The use of social media on political participation among university students: An analysis of survey results from rural Pakistan. SAGE Open, 9(3), 1–13. https://doi.org/10.1177/2158244019864484

ANAK AGUNG ISTRI DEWI ADHI UTAMI, I. W. (2026). The role of digital literacy in preventing the spread of political disinformation among first-time voters in Indonesia. Indonesian Research Journal in Education, 143-157.

Anggraeni, L., Azis, A., Praja, W. N., Nufus, A. B., Tanshzil, S. W., Manarta, L. O. M. R. A. U., Siahaan, M., Rahmelia, Si., Apandie, C., Saepudin, E., Nugraha, Y., & Hardiyanto, L. (2024). Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (M. P. Awaluddin, S.Sos (Ed.); Ipah Kurni). Cv Hei Publishing Indonesia.

Apdillah, D., Zebua, R. B., Idham, M., & Anhar, I. (2022). Teknologi Digital Di Dalam Kehidupan Masyarakat. *Selodang Mayang*, *8*(2), 101–107. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47521/Selodangmayang.V8i2.247

Arpandi. (2023). Media Online Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum (Pemilu). *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1), 843–855. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.56832/Edu.V3i1.293

Azwar, A. (2022). Tindakan Komunikatif Komunitas Virtual Untuk Mengurangi Disinformasi Pemberitaan Politik Di Media Sosial. *Jwp (Jurnal Wacana Politik)*, *7*(2). Https://Doi.Org/10.24198/Jwp.V7i2.40336

Az-Zahra, F., Lumbanbatu, R. B., Siburian, T. D. N., & Anggraini, T. (2025). Kewarganegaraan Digital Dan Tantangan Etika Bermedia Sosial Di Era Disrupsi Informasi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 9(2), 327–338. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31571/Jpkn.V9i2

Hanif, M., & Salsabillah, N. A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Digital (Perspektif Teori Sosialisasi Politik). Pendidikan Kewarganegaraan, 11(2).

Herianto, E., Indriyani, D., Komalasari, K., Malihah, E., Fitriasari, S., Zuriah, N., Rochmadi, N. W., Setyowati, N., Mahardhani, A. J., Indrawati, Sulton, & Cahyono, H. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Digital (A. M. Isbn: (Ed.); Handarini). Widina Bhakti Persada Bandung (Grup Cv. Widina Media Utama).

Lestari, S. A., Saputri, E. D., & Zuhad. (2025). Digital Literacy And Political Disinformation : A Critical Study Of Ikip Pgri Bojonegoro Students On Tiktok. Jurnal Setia Pancasila, 06(1), 72–82. Https://E-Jurnal.Stkippgrisumenep.Ac.Id/Index.Php/Jsp%0adigital

Matnuh, H., Fahlevi, R., Kiptiah, M., & Anisa, F. (2024). Internalisasi Literasi Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Mata Pelajaran Ppkn Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *14*(1). Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.20527/Kewarganegaraan.V14i1.19469

Muhammad, K., Firdaus, S. U., Hasrul, M., & Aci, L. (2023). Kebijakan Publik Dan Politik Hukum : Membangun Demokrasi Berkelanjutan Untuk Masyarakat. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, *2*, 354–368. Https://Journal.Uns.Ac.Id/Index.Php/Sovereignty/Article/View/980

Nasoha, A. M. M., Pusparini, Z. D., Paujia, H., Saputri, V. D., & Anan, H. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Strategi Counter Disinformation Di Era Post-Truth. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(5), 873–887. Https://Doi.Org/10.57251/Polyscopia.V2i1.1559

Pipit Widiatmaka, I. D. (2023). Peningkatan Civic Literasi dengan Memanfaatkan Literasi Digital Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jurnal Pekommas, 59-70.

Rahim, S. N., Shabrina, H. N., Salsabila, R., Hanum, S., Zemlya, N. A., & Rahman, A. (2024). The Role Of Buzzers On Social Media In Shaping Public Policy Opinion During The 2024 Election. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, *8*(2). Https://Doi.Org/10.35722/Jurnalpubbis.V8i2.1051

Sarjito, A. (2024). Hoaks , Disinformasi , Dan Ketahanan Nasional : Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal Of Governance And Local Politics*, *6*(2), 175–186. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47650/Jglp.V6i2.1547

Saragih, O. A., Sitanggang, A., Sianipar, R. A., Sitanggang, A. T., & Halking. (2025). Media Dalam Membentuk Opini Publik Pada Pemilihan Presiden 2024-2029 Di Jurusan Ppkn Stambuk 2023. In Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Vol. 8, Issue 1). Http://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jrpp Volume

Shu, K., Bhattacharjee, A., Alatawi, F., Nazer, T., Ding, K., Karami, M., & Liu, H. (2020). Combating disinformation in a social media age. arXiv Preprint. https://doi.org/10.48550/arXiv.2007.07388

Somadi, & Amelia, R. (2025). Penggunaan Media Sosial Dalam Proses Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Ilmiah Ilmu Politik*, *03*(02), 58–70. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org

Susilawati, E., & Kurnia, H. (2024). Etika Dalam Pendidikan Politik (Menghadapi Bias Dan Propoganda). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, *2*(2), 93–112.

Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61476/4mdpy810

Swart, J., Peters, C., & Broersma, M. (2019). Sharing and discussing news in private social media groups. Digital Journalism, 7(2), 187–205. https://doi.org/10.1080/21670811.2018.1465351

Thomas, P. B., Hogan-Taylor, C., Yankoski, M., & Weninger, T. (2021). Pilot study suggests online media literacy programming reduces belief in false news in Indonesia. arXiv Preprint. https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.08034

Umam, A. F. (2025). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Digital dalam Membentuk Literasi Politik Generasi Z di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Jendela Pendidikan*, *15*(1), 33–41.

Wulandari, C. D., Muqsith, M. A., & Ayuningtyas, F. (2024). Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Avant Garde*, *11*(01), 134–146.

Yunita, S., Milala, E. B., Siregar, M., Gaol, R. L., & Panjaitan, R. (2023). Analisis Kritis Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum. *Indonesian Journal Of Learning Studies*, *3*(1), 164–172. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.53769/Ijls.V5i2.1664